

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana order fiktif pada aplikasi Gojek serta alasan putusan dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Pasal 51 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) apakah pelaku order fiktif dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya? 2) apakah alasan putusan dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Pasal 51 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP? . Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Temuan skripsi menunjukkan bahwa: 1) dalam putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Ckr, penulis menilai dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini kurang sesuai. Ketidaksesuaian ini terjadi karena hakim dalam mempertimbangkan kasus para terdakwa hanya melihat dari segi subjek hukum tanpa melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya sehingga pemberatan sanksi pidana kepada para terdakwa sama. Menurut pendapat penulis dakwaan hingga tuntutan yang diberikan seharusnya terletak di putusan yang berbeda. 2) para terdakwa telah memenuhi unsur- unsur pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, dimana para terdakwa memenuhi pula unsur pertanggungjawaban dari pemicidanaannya. Namun, penulis berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan serta perlindungan kepada driver dan juga perusahaan online seperti gojek atas perbuatan order fiktif tersebut.

Kata kunci : *Order Fiktif, Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the appropriateness of the accountability of perpetrators of criminal acts of fictitious orders on the Gojek application as well as the reasons for the punishment in imposing sentences in accordance with Pasal 51 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. The formulation in this study are : 1) 1) Can the perpetrator of a fictitious order be held criminally responsible for his actions? 2) Are the reasons for the decision in imposing the sentence in accordance with Pasal 51 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. In writing this thesis the author uses normative juridical research methods with approaches including: statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). Analysis of legal materials is carried out by identifying, classifying, interpreting, and evaluating legal materials related to the issues discussed. The thesis findings show that: 1) in decision Number 453/Pid.Sus/2020/PN.Ckr, the author considers that imposing sanctions on the defendant in this case is inappropriate. This discrepancy occurs because the judge, when considering the defendants' case, only looks at it from the perspective of the legal subject without looking at it from the perspective of criminal liability, so that the severity of the criminal fines for the defendants is the same. In the author's opinion, the indictment and the charges given should come to different conclusions. 2) the respondents have fulfilled the elements in Pasal 51 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik where the respondents also fulfill the accountability elements of their sentences. However, the author believes that there is a need for regulation and protection for drivers and online companies such as Gojek for these fictitious orders.

Keyword: *Fictitious Orders, Crime Punishment, Crime Liability.*